

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA DI DESA SUNGAI JANJAM KECAMATAN
BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DESA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengajukan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

FIRDINAN

NPM : 2022348

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : FIRDINAN
NPM : 2022348
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA SUNGAI JAN-JAM KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.”

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

M. Ridha Anshari, S.Sos., M.A
NUPTK. 1107129401

Pembimbing 2

Mahdalina, S.Pd.I., M.Pd
NUPTK. 1101018701



Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Bahagi, S.Sos., M.A

NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA SUNGAI JANJAM KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun isi yang disampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis dalam penyusunan proposal skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, April 2026

Firdinan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis.....	8
1. Kebijakan Publik.....	11
2. Implementasi	14
3. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Tipe Penelitian.....	22

D. Data dan Sumber Data.....	22
E. Desain Operasional	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
H. Teknik Kredibilitas Data	27

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	24
Tabel 3.2 Desain Operasional Variabel	25

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, agar mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat. Perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui bantuan sosial, pemerintah berupaya memberikan jaminan kepada masyarakat agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Salah satu program bantuan sosial yang banyak diterapkan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu bantuan berupa uang tunai yang

diberikan secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Program BLT memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan ketepatan penyaluran karena bantuan diberikan langsung kepada penerima. Dengan demikian, BLT diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dalam berbagai kondisi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk BLT. Salah satu dasar hukum tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan kelompok rentan. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, kebijakan terkait BLT juga diperkuat melalui regulasi turunan, seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program BLT, khususnya BLT Dana Desa. Pemerintah desa

menjadi ujung tombak dalam proses pendataan, penetapan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaan BLT di tingkat desa dilakukan melalui tahapan yang terencana, mulai dari identifikasi calon penerima, verifikasi dan validasi data, hingga penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan unsur masyarakat, sehingga diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, pelaksanaan BLT di tingkat desa juga mencerminkan adanya pendekatan desentralisasi dalam kebijakan publik, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, program BLT diharapkan dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu wilayah yang melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Desa Sungai Janjam yang berada di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor ekonomi lokal, sehingga keberadaan program BLT menjadi sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan BLT di Desa Sungai Janjam dilakukan sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang dilaksanakan bersama

masyarakat dengan dukungan perangkat desa dan unsur terkait. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, terutama aparat desa sebagai pelaksana utama di lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Salah satu wilayah yang melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Desa Sungai Janjam yang berada di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa ini memiliki karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam. Pelaksanaan program BLT di wilayah ini telah berjalan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Jan-Jam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Janjam. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan secara merata, sehingga masih terdapat warga yang tidak mengetahui program BLT secara utuh. Informasi yang diterima masyarakat juga belum sepenuhnya jelas, terutama terkait tujuan, mekanisme, dan kriteria penerima bantuan, sehingga menimbulkan kebingungan dan perbedaan pemahaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan koordinasi antar pelaksana masih belum optimal, serta mencerminkan belum maksimalnya tanggung jawab aparat dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang jelas

dan merata. (*Sumber Data : Mekanisme BLT Dana Desa, di Desa sungai Janjam tahun 2026*)

2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan dengan sistem acak seperti arisan. Penyaluran bantuan secara acak merupakan kondisi di mana distribusi bantuan tidak didasarkan pada data dan kriteria yang jelas, sehingga tidak menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penentuan penerima bantuan belum didasarkan pada informasi atau data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan aparat dalam melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan. (*Sumber Data :Penerima BLT Tahun 2025-2026*)
3. Waktu pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih belum jelas kapan pembagian itu dilaksanakan.

Ketidakjelasan waktu pelaksanaan merupakan kondisi di mana suatu program tidak memiliki jadwal yang pasti dan terencana, sehingga pelaksanaannya berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Permasalahan ini terlihat dari pelaksanaan BLT yang tidak memiliki jadwal tetap, sehingga waktu penyaluran sering berubah-ubah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum dilakukan secara konsisten dan terencana dengan baik. (*Sumber Data : Mekanisme BLT Dana Desa, di Desa Sungai Janjam tahun 2026*)

Berdasarkan dari fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Program Bantuan**

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah dengan menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Dalam hal ini fokus penelitian mengambil teori tentang Implementasi menggunakan teori menurut George Charles Edwards III (dalam Leo Agustino, 2022:154-158). Dalam teori tersebut ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang Implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, menambah pengetahuan mahasiswa, serta menjadi referensi penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, juga sebagai sarana untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis serta untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Nor Effendi (2023) ***“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”***. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Program Studi Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 informan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BLT di Desa Matang Lurus belum berjalan optimal, yang ditandai dengan penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, kurangnya pemahaman pelaksana, rendahnya transparansi, serta keterlambatan penyaluran akibat kendala administratif. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya komitmen pelaksana turut mempengaruhi pelaksanaan program, sehingga masyarakat merasa kurang puas terhadap pembagian bantuan.
2. Rahayu, Mega Mustika Thirta (2022) ***“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu”***. Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Makmur Mulia berdasarkan teori George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BLT telah berjalan dengan baik, ditandai dengan komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta struktur birokrasi yang berjalan sesuai prosedur. Namun, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan penyampaian informasi agar pelaksanaan program lebih optimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2022:1) “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan terbaik.”

Kebijakan publik menurut Indra Kertati, dkk. (2023:1) secara umum dapat didefinisikan sebagai “Sebuah sistem berupa regulasi yang merupakan tindakan pengaturan, atau prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan oleh entitas pemerintah. Dalam arti luas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam mengatur masyarakat.”

Sementara itu, menurut William N. Dunn dalam (Suharno, 2020:25) mengartikan ‘kebijakan publik sebagai rangkaian pilihan-

pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah di bidang-bidang yang menjadi tugas pemerintah ‘

Menurut Thomas Dye dalam (Subarsono, 2021:2) ‘Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publipolicy is whatever governments choose to do or not to do).’

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam (Marwiyah, 2022:13) antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam (Marwiyah, 2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

2) Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik Menurut Edi Suharto (2020: 67–

69), tahapan kebijakan publik meliputi: adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga layak untuk ditangani oleh pemerintah.

2) Penyusunan Agenda Kebijakan

Penyusunan agenda kebijakan adalah proses penentuan masalah yang akan menjadi prioritas pemerintah. Tidak semua masalah publik masuk ke agenda kebijakan, melainkan hanya yang dianggap penting dan mendesak. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

3) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahap perumusan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk memilih kebijakan terbaik.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan kebijakan oleh lembaga atau aparat pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi Kebijakan/ Penilaian

5) Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, baik dari segi proses, hasil, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam (Syahrudin, 2019:28), dimana implementasi diartikan sebagai "getting a job done" dan "doing a." Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut resources.

Sementara itu menurut Budi Winarno (2021: 148): 'Implementasi kebijakan merupakan proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.'

Sedangkan menurut Wahab dalam (Marwiyah, 2022:36) 'Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.'

Menurut Riant dalam (Joko Pramono, 2022:2) 'Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan atau turunan dari strategi tersebut. Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat operasional langsung meliputi perintah

presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur.'

b. Model Implementasi Kebijakan

1) Model George C. Edward III

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-158) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk

melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Leo

Agustino, 2022:150-153) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

3) Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Leo Agustino, 2022:159)

keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

4) Model Charless O. Jones

Menurut Jones dalam (Leo Agustino, 2022:169-170) dalam

melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

5) Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Subarsono, 2021:101) ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

- a) Kondisi lingkungan;
- b) Hubungan antar organisasi; Sumberdaya organisasi untuk
- c) implementasi program;
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

6) David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam (Subarsono, 2021:103-104) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a) Logika kebijakan;
- b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; dan
- c) Kemampuan implementor kebijakan.

2. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai secara langsung. Program ini dirancang sebagai upaya untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta mengurangi dampak tekanan ekonomi yang timbul

akibat berbagai kondisi, seperti kenaikan harga bahan pokok, inflasi, maupun krisis ekonomi.

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, BLT menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar sebagai penerima manfaat berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan adanya bantuan dalam bentuk uang tunai, masyarakat memiliki keleluasaan dalam mengatur penggunaannya sesuai dengan kebutuhan prioritas rumah tangga masing-masing.

Pelaksanaan program BLT dilakukan dengan mekanisme penyaluran secara langsung kepada penerima manfaat, baik melalui lembaga keuangan, kantor pos, maupun aparat pemerintah desa. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan serta memastikan bahwa bantuan dapat diterima secara utuh oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, penyaluran secara langsung juga dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk barang, karena dapat segera dimanfaatkan oleh penerima.

Namun demikian, dalam implementasinya, program BLT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan data yang akurat, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

upaya perbaikan yang berkelanjutan, terutama dalam hal validasi data, transparansi informasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

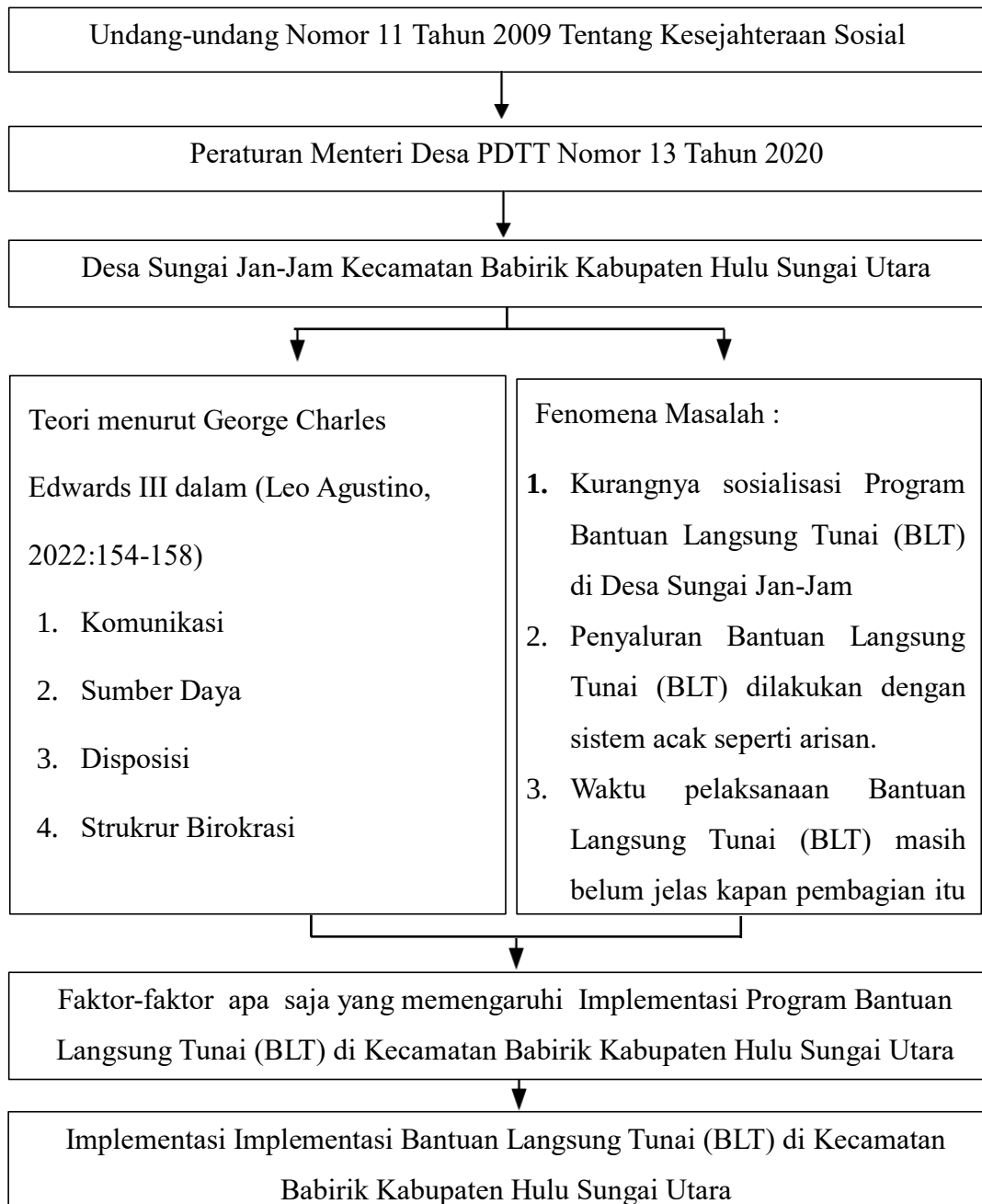
C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan, salah satunya melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur pemanfaatan Dana Desa untuk penyaluran BLT kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi BLT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan program tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori tentang Implementasi menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam (Leo Agustino, 2022:154-158). Dalam teori tersebut ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini bertempat di Desa Sungai Jan-Jam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. 71454

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Zuchri Abdussamad (2021:30) “Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.”

Menurut Kaelan dalam (Ibrahim, 2018:53) ‘Pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti dan matematis).’

Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor dalam (Zuchri Abdussamad, 2021:30) menyebutkan bahwa ‘Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*.’

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono dalam (I Made Sudarma Adiputra, dkk, 2021:45) ‘Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif.’

Definisi Metode deskriptif kualitatif menurut Kim, Sefcik and Bradway dalam (Ahmad Fauzi, dkk, 2022:24-25) adalah ‘Metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual.’

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Menurut Ibrahim (2018:68) “Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung”

Menurut Bungin dalam (Ibrahim , 2018:68) ‘Data primer adalah sebagai data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama di lapangan.’

b. Data Sekunder

Menurut Bungin dalam (Ibrahim, 2018:69) ‘Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder ini menurutnya terbagi kedalam dua bentuk; pertama, internal data, yang tersedia tertulis pada sumber data sekunder; Kedua, eksternal data, yang diperoleh dari sumber luar seperti data sensus atau data statistik.’

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal dan lainnya. Serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga didapat dari literatur di internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Menurut Kaelan dalam (Ibrahim, 2018:67) ‘Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian.’

Sedangkan menurut Satori dalam (Ibrahim, 2018:67) ‘Sumber data berupa benda, orang maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang sosial situation dalam objek material penelitian (sumber informasi).’

Sumber data yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Ibrahim (2018:72) “*Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih informan dengan tujuan tertentu dalam benaknya. Dengan *purposive sampling*, peneliti tidak pernah tahu apakah informan yang dipilih mewakili populasi.”

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kaur Perencanaan	1 orang
4	Kasi Kesejahteraan	1 orang
5	Ketua RT	1 Orang
6	BPD	1 Orang
7	Masyarakat	1 Orang
8	Penerima BLT	4 Orang
Total		11 Orang

E. Desain Operasional

Desain operasional penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah. Penelitian ini yang berjudul Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam (Leo Agustino, 2022:154-158) yang mana ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Program menurut Teori George Charles Edwards III (Leo Agustino, 2022:154-158)	Komunikasi	1. Penyaluran Informasi (Sosialisasi) 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Wewenang 3. Informasi
	Disposisi	1. Komitmen/Tanggung Jawab 2. Pengaturan Birokrasi 3. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. SOP 2. Koordinasi 3. Evaluasi

(Sumber : Dibuat Penulis, 2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023:296) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Riyanto dalam (Hardani, dkk, 2020:125) ‘Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebelumnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.’

2. Wawancara

Menurut Nazir dalam (Hardani, dkk, 2020:138) ‘Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau reponden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).’

3. Dokumentasi

Menurut Hardani, dkk. (2020:149-150) “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data- data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.”

G. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani, dkk, 2020:163-171) dibagi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam

cara melalui seleksi ketat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

H. Teknik Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023:365-371) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru. Dengan Perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data atau urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik Amuntai*: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Anonim. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Anonim. PPDT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan dampak ekonomi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Adiputra, I. M. dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, Ahmad. dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Pena Persada.
- Hardani. dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kertati, Indra. dkk. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing indonesia.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makasar: CV Mitra Ilmu.
- Rahayu, Mega Mustika Thirta . 2022 . Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. *Ilmu Pemerintahan*
- Nor Effendi . 2023. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3063-3064.

- Pramono, Joko. 2022. *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Suharno. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2020. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media
- Winarno, Budi. 2021. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).